

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN PRODUK LOKAL DI KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Raghdarajasa Shang Aghamooghti
NPP. 32.0492

Asdaf Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: raghdarajasa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The high percentage of poverty in Kulon Progo Regency is consistently the highest in the Special Region of Yogyakarta Province, so the Kulon Progo Regency Government through the social service office of women's empowerment and child protection issued a Non-Cash Food Assistance (BPNT) program sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). **Purpose:** This study aims to analyze and describe the implementation of poverty reduction policies through local product empowerment in Kulon Progo Regency and to identify and describe the efforts of the Kulon Progo Regency Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in optimizing the program. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This research was analyzed based on the theory of policy implementation according to Knill and Tosun with six dimensions, namely the choice of policy instruments, policy design, control structure, institutional design, administrative capacity, and social acceptance. The informants involved in this research were 6 informants as key informants and informants who were drawn through one or two informant samples. If it was felt that this was not enough, the author would look for other informants who had information in collecting data. **Result:** The findings obtained by the author are that the number of registered suppliers has not reached 70% of the total E-Warong as mandated by the Kulon Progo Regent Regulation Number 6 of 2022, the supervision mechanism has not been integrated and there is still minimal community involvement in supervision, many agencies are involved but coordination between agencies has not been effective resulting in confusion of roles and responsibilities, human resources and supporting technology are inadequate so that it affects the effectiveness of the program. **Conclusion:** The poverty reduction policy through the local product-based APBD BPNT in Kulon Progo is running quite well but not yet optimal. The main obstacles are the lack of local suppliers, weak coordination between DPOs, and limited capacity of implementers. However, community support and local potential are strengths that need to be maximized for program sustainability.

Keywords: Poverty, Implementation, Local Products, Food Aid, Community Empowerment

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masih tingginya persentase kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo yang secara konsisten menjadi yang tertinggi di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta, sehingga Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengeluarkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan produk lokal di Kabupaten Kulon Progo dan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dalam mengoptimalkan program. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Knill dan Tosun dengan enam dimensi yaitu pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur kontrol, desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan penerimaan sosial. Informan yang terlibat dalam penelitian ini 6 informan sebagai informan kunci dan informan yang ditarik melalui satu atau dua sampel informan jika dirasa tidak cukup penulis akan mencari informan lain yang memiliki informasi dalam pengambilan data. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis adalah jumlah pemasok yang terdaftar belum mencapai 70% dari total E-Warong sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2022, mekanisme pengawasan belum terintegrasi dan masih minim pelibatan masyarakat dalam pengawasan, banyak instansi terlibat tetapi koordinasi antar instansi belum berjalan efektif sehingga terjadi kebingungan peran dan tanggung jawab, sumber daya manusia dan teknologi pendukung belum memadai sehingga mempengaruhi efektivitas program. **Kesimpulan:** Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui BPNT APBD berbasis produk lokal di Kulon Progo berjalan cukup baik namun belum optimal. Hambatan utama terletak pada kurangnya jumlah pemasok lokal, lemahnya koordinasi antar OPD, dan terbatasnya kapasitas pelaksana. Meski demikian, dukungan masyarakat dan potensi lokal menjadi kekuatan yang perlu dimaksimalkan untuk keberlanjutan program.

Kata kunci: Kemiskinan, Implementasi, Produk Lokal, Bantuan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sangat luas dan memiliki beberapa permasalahan pada bidang pembangunan, salah satunya persoalan kemiskinan yang sampai sekarang belum tuntas dan cenderung bertambah, bersifat kompleks dan multidimensional (Iza et al., 2021). Berdasarkan data BPS, Indonesia mengalami penurunan persentase penduduk miskin periode tahun 2019 hingga 2023 sebesar 0,05%. Upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ke level yang lebih rendah. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 adalah 26.424.020 jiwa dengan persentase 9,78%, tahun 2021 mencapai angka tertinggi 27.542.770 jiwa dengan persentase 10,14%, kemudian pada tahun 2022 dan 2023, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 26.161.160 jiwa dan 25.898.550 jiwa dengan persentase 9,54% dan 9,36% (BPS, 2023). Walaupun terjadi penurunan persentase kemiskinan pada tahun 2023 tapi jumlah penduduk miskin masih lebih tinggi jika di bandingkan tahun 2019, empat tahun yang lalu.

Pulau Jawa sebagai pulau dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dan merupakan pusat ekonomi dan politik di tanah air. Namun, di balik kemajuan tersebut, tantangan besar seperti kemiskinan masih menjadi masalah yang harus dihadapi (Reynaldy,

2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, penduduk miskin paling banyak ada di Pulau Jawa yaitu 13.237.780 jiwa pada tahun 2023, jumlah ini setara dengan 51,1% dari jumlah penduduk miskin Indonesia yaitu 25.898.550 jiwa. Peningkatan kemiskinan dapat memperparah ketimpangan pendapatan dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi (Asongu & Eita, 2023). Pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi permasalahan memberikan tugas kepada pemerintah daerah dengan kebijakan otonomi daerah yang diberikan kepada setiap daerah otonom di Indonesia (Sadayi et al., 2022). Secara umum suatu pemerintahan memiliki 4 (empat) fungsi yaitu, pelayanan, pengaturan, pembangunan dan pemberdayaan, dan otonomi daerah merupakan kebebasan kepada daerah untuk mengatur daerahnya dan menjalankan empat fungsi pemerintah tersebut di daerah, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah (Rumbekwan et al., 2021). Berdasarkan data BPS periode 2021-2023, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase kemiskinan tertinggi selama tiga tahun terakhir di Pulau Jawa . Untuk itu pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus segera mengambil langkah sebagai upaya agar kemiskinan di daerah mampu teratasi.

Tabel 1. 1

Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2023 (%)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	Kab. Bantul	13,50	14,04	12,27	11,96	12,86
2	Kab. Gunung Kidul	17,07	17,69	15,86	15,60	16,55
3	Kab. Kulon Progo	18,01	18,38	16,39	15,64	17,10
4	Kab. Sleman	8,12	8,64	7,74	7,52	8,05
5	Kota Yogyakarta	7,27	7,69	6,62	6,49	7,01
	Prov. D.I Yogyakarta	12,28	12,80	11,34	11,04	11,86

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2024

Berbicara tentang permasalahan kemiskinan, tentunya masyarakat mendambakan program yang ideal di setiap wilayah, namun program pengentasan kemiskinan sering kali disamaratakan dan berfokus pada program yang langsung mengarah ke sasaran, sehingga potensi dan modalitas masyarakat tidak dapat dimanfaatkan, yang berakibat pada program yang tidak berjalan bahkan gagal (Alawiyah & Setiawan, 2021). Pemerintah, dalam memberikan bantuan pada masyarakat perlu memperhatikan potensi yang dimiliki masyarakat, salah satunya berupa sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan pemerintah guna menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesejahteraan. Sumber daya tersebut dapat dioptimalkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui wirausaha yang memanfaatkan sumber daya alam khususnya pangan lokal (Minarti et al., 2019).

Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang gencar dalam hal perlindungan dan pengembangan produk lokal, melalui berbagai kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) serta promosi produk-produk asli daerah. Hal ini dijalankan melalui gerakan “Bela Beli Kulon Progo” yang dimulai sejak 2013 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal. Program ini memiliki tujuan untuk membangun ekonomi di Kulon Progo dengan mengajak masyarakat Kulon Progo untuk menggunakan produk-produk lokal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Wicaksono, 2022). Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat beli masyarakat terhadap produk lokal yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Kulon Progo sehingga dapat menekan angka kemiskinan.

Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan kemiskinan memiliki salah satu program unggulan dalam upaya menekan angka kemiskinan, yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bersumber dari APBD. BPNT APBD ini memiliki skema penyediaan komoditas yang berasal dari produk lokal, diperoleh dari hasil petani Kabupaten Kulon Progo. Komoditas pada BPNT APBD ini berupa beras, telur, lele, gula semut, tahu, tempe, sayur, dan buah yang merupakan hasil produksi dari kelompok-kelompok masyarakat atau petani lokal di Kulon Progo, yang dibina oleh perangkat daerah mitra dan telah disepakati dengan perjanjian kerja sama. BPNT di Kabupaten Kulon Progo terbagi menjadi dua, yaitu bersumber dari APBN dan bersumber dari APBD. BPNT yang bersumber dari APBD Kabupaten Kulon Progo ini nantinya akan menysasar kurang lebih 4.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program BPNT APBD ini bukan hanya KPM yang memperoleh manfaatnya, tetapi juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan produk lokal melalui pemberdayaan masyarakat bagi penyedia komoditas BPNT APBD. Pemberdayaan adalah pemberian kekuatan kepada kelompok yang dianggap lemah dan belum mempunyai kekuatan sehingga menjadi berdaya, dan hal ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah yang seharusnya mendapat dukungan dari pihak-pihak yang mendukung pemerintah (Dewi et al., 2025). Penyaluran BPNT ini di atur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Tujuan pemilihan komoditas dari produk lokal ini tertuang pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa “Pemilihan jenis komoditas BPNT bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan produk lokal, dan penanggulangan kemiskinan KPM”. Program ini juga sebagai upaya pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal.

Penyedia komoditas BPNT APBD ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi, hal ini di atur dalam pasal 4 ayat 1 bahwa “Daftar pemasok komoditas dalam pelaksanaan BPNT ditetapkan oleh perangkat daerah mitra yang membidangi”. Selanjutnya dalam penetapan pemasok komoditas oleh perangkat daerah mitra yang membidangi, memiliki jumlah minimal yang harus ditetapkan. Tertuang pada pasal 4 ayat 2 bahwa “Perangkat daerah mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) pemasok komoditas dari jumlah E-Warong yang ada”.

Tabel 1. 2

Daftar Pemasok Komoditas BPNT APBD

Jumlah E-Warong	Jumlah Pemasok	Jenis Komoditas	Dinas Pengampu
24	12 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)	Beras	Dinas Pertanian dan Pangan
	25 Pokdakan (Kelompok Budidaya Ikan)	Ikan lele	Dinas Kelautan dan Perikanan
	23 IKM (Industri Kecil Menengah)	Tahu, tempe	Dinas Industri Koperasi dan UMKM
	15 KWT (Kelompok Wanita Tani)	Buah, sayur	Dinas Pertanian dan pangan
	53 Peternak	Telur	Dinas Pertanian dan

			pangan
	10 Koperasi	Gula semut, minyak goreng	Dinas Industri Koperasi dan UMKM

Sumber : Diolah Penulis dari Dinas Sosial PPPA Kulon Progo, 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas E-Warong yang berperan sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai APBD berjumlah 24 E-Warong yang mana jumlah komoditas minimal 70% dari jumlah E-Warong, sehingga 17 pemasok merupakan jumlah minimal yang harus didaftarkan perangkat daerah mitra pada program BPNT APBD. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah pemasok belum mencapai jumlah minimal pada komoditas beras, buah dan sayur, gula semut dan minyak goreng. Tidak terpenuhinya jumlah penyedia komoditas ini dapat berimplikasi pada pemerataan target, terutama penyedia komoditas yang tidak terdaftar pada penyedia komoditas Bantuan Pangan Non Tunai APBD, karena setiap E-Warong hanya diperbolehkan mengambil komoditas Bantuan Pangan Non Tunai dari penyedia komoditas yang telah terdaftar pada dinas yang membidangi setiap komoditas.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kulon Progo bertujuan untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin, namun realisasi di lapangan belum optimal. Dari tahun 2020–2023, penurunan kemiskinan hanya rata-rata 0,59% dan Kulon Progo masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di DIY. Selain itu, pemenuhan minimal 70% pemasok komoditas lokal BPNT belum tercapai, mencerminkan belum optimalnya pemberdayaan produk lokal dalam program tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) APBD ini yaitu terletak pada belum optimalnya pemenuhan syarat minimal jumlah pemasok komoditas lokal, di mana jumlah pemasok yang terdaftar belum mencapai 70% dari total E-Warong sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2022. Jumlah pemasok komoditas dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 3

Daftar Pemasok Komoditas Program BPNT APBD

Jumlah E-Warong	Jumlah Pemasok	Jenis Komoditas	Dinas Pengampu
24	12 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)	Beras	Dinas Pertanian dan Pangan
	25 Pokdakan (Kelompok Budidaya Ikan)	Ikan lele	Dinas Kelautan dan Perikanan
	23 IKM (Industri Kecil Menengah)	Tahu, tempe	Dinas Industri Koperasi dan UMKM
	15 KWT (Kelompok Wanita Tani)	Buah, sayur	Dinas Pertanian dan pangan
	53 Peternak	Telur	Dinas Pertanian dan pangan
	10 Koperasi	Gula semut, minyak goreng	Dinas Industri Koperasi dan UMKM

Sumber : Diolah Penulis dari Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo

Tidak terpenuhinya jumlah penyedia komoditas ini merupakan belum optimalnya program dan dapat berimplikasi pada pemerataan target, terutama penyedia komoditas yang

tidak terdaftar pada penyedia komoditas Bantuan Pangan Non Tunai APBD, karena setiap E-Warong hanya diperbolehkan mengambil komoditas Bantuan Pangan Non Tunai dari penyedia komoditas yang telah terdaftar pada dinas yang membidangi setiap komoditas.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kebijakan publik maupun program bantuan sosial. Penelitian Nur Handayani, Riza Risyanti, Suripto, Fernandes Simangunsong pada Tahun 2023 yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur”. Menunjukkan bahwa “*coolaborative governance*” dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah Bangkalan tidak efektif dilihat dari “kondisi awal, *design*” institusional, “kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi” disebabkan belum adanya keseragaman standar dan persepsi mengenai masyarakat miskin (Handayani et al., 2023).

Penelitian Dwita Agustina, Suci Megawati pada Tahun 2022 yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto”. Menunjukkan bahwa program BPNT dalam penanggulangan kemiskinan dengan kriteria *Input*, *Outputs*, dan *Outcomes* telah berjalan optimal sedangkan pada kriteria proses belum berjalan optimal (Agustina & Megawati, 2022).

Penelitian Fidianing Sopah, Winda Kusumawati, Calvin Edo Wahyudi pada Tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo”. Menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 14 poin C yakni pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo (Sopah et al., 2020).

Penelitian Yenchilia Tresna Damanik, Afular Marom pada Tahun 2016 yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Serang”. Menunjukkan bahwa program pelatihan keterampilan belum optimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan disebabkan program tidak berkelanjutan, masyarakat yang terkendala modal dalam membangun usaha, dan peran pendamping yang masih lemah (Damanik et al., 2016).

Penelitian Hajar Risa, Badaruddin pada Tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Program Padat Karya Tunai dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading”. Menunjukkan Implementasi program Padat Karya Tunai dari Dana Desa Karang Gading pada kegiatan rabat beton penimbunan sirtu pada Dusun VI untuk tahun anggaran 2020 hasilnya belum maksimal disebabkan sumber daya manusia yang tidak mumpuni, komunikasi pemerintah yang belum maksimal, struktur birokrasi belum memadai (Risa et al., 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi dari program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan produk lokal. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal objek, fokus analisis, dan penggunaan teori. Pertama, objek penelitian ini adalah implementasi program BPNT yang didanai dari APBD dan berbasis pemberdayaan produk lokal di Kabupaten Kulon Progo, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu menyoroti BPNT secara umum atau kebijakan penanggulangan kemiskinan tanpa penekanan pada sinergi antara bantuan sosial dan perlindungan produk lokal.

Kedua, fokus penelitian ini adalah pada faktor pendukung, penghambat, serta upaya optimalisasi implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan

dari Knill dan Tosun (2020). Ini menjadi poin pembeda karena sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi klasik seperti Merilee Grindle, Van Meter & Van Horn, atau evaluasi kebijakan (Bridgman & Davis, William Dunn), sementara pendekatan Knill dan Tosun lebih komprehensif dalam melihat interaksi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat, serta menggarisbawahi enam dimensi implementasi. Dengan demikian, kebaruan penelitian terletak pada kombinasi antara konteks lokal (Kulon Progo), pendekatan pemberdayaan produk lokal melalui BPNT APBD, dan penggunaan teori kontemporer Knill & Tosun, yang memberikan kontribusi baru dalam kajian implementasi kebijakan sosial berbasis lokal.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan produk lokal di Kabupaten Kulon Progo dan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan, serta upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dalam mengoptimalkan program.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam melaksanakan pengamatan. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berkaitan dengan masalah sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok (Creswell & Poth, 2018). Metode yang digunakan oleh penulis pada proses pengamatan adalah menggunakan metode deskriptif, Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data atau sumber yang akurat dan diteliti secara sistematis (Sahir, 2021: 6). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari sumber datanya (Simangunsong, 2017). Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan 6 informan yang ditentukan melalui *purposive sampling* yaitu menargetkan individu yang memiliki karakteristik unik yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga menghasilkan wawasan yang mendalam (Palinkas et al., 2015) dan *snowball sampling* yaitu penentuan informan karena keterbatasan akses kepada informan, *snowball sampling* memiliki fakta bahwa informan yang memiliki lebih banyak koneksi memungkinkan untuk mengikutsertakan informan yang lebih banyak (Turner, 2020). Informan yang ditentukan melalui *purposive sampling* terdiri dari Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo; Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin; Kepala Bidang Ketahanan Pangan; Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan; Kepala Seksi Agro Makanan dan Minuman. Sedangkan informan yang ditentukan melalui *snowball sampling* merupakan kelompok binaan penyedia komoditas BPNT APBD; Pemilik E-Warung; Keluarga Penerima Manfaat. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Knill & Tosun (2020) yang mencakup enam dimensi yaitu pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur kontrol, desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan penerimaan sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Produk Lokal di Kabupaten Kulon Progo

Penulis menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan produk lokal pada program BPNT APBD dengan berfokus kepada implementasi program, faktor pendukung dan penghambat program, dan upaya optimalisasi program. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

A. Pilihan Instrumen Kebijakan

Pemilihan instrumen kebijakan dalam program BPNT APBD Kulon Progo dianalisis menggunakan pendekatan Knill & Tosun (2020), yang menyatakan bahwa kesesuaian instrumen bergantung pada dua hal: kompleksitas lingkungan kebijakan dan kapasitas pemerintah. Berdasarkan hal ini, BPNT APBD memadukan instrumen subsidi (bantuan sosial) dan instrumen arahan (dalam bentuk Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2022) yang mengatur pelaksanaan program secara teknis dan legal. Kabupaten Kulon Progo memiliki kapasitas yang cukup baik, ditunjukkan oleh alokasi anggaran tetap sebesar Rp10,56 miliar per tahun untuk 4.400 KPM dan adanya tim koordinasi lintas OPD sebanyak 35 personil. Kompleksitas kebijakan juga tinggi, terlihat dari banyaknya aktor yang terlibat (Dinas Sosial, Pertanian, Kelautan, UMKM), banyaknya alternatif kebijakan (pelatihan, pemberdayaan, digitalisasi), serta tujuan multidimensi seperti pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan produk lokal.

Dari sisi ketepatan instrumen, penggunaan bantuan sosial berbasis produk lokal dinilai tepat sasaran, karena tidak hanya menysasar KPM tetapi juga memberdayakan pelaku lokal. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan pelaksana teknis yang menyebutkan bahwa kebijakan ini relevan dengan karakteristik daerah dan memiliki dampak ekonomi ganda. Sementara dari sisi kemudahan pelaksanaan, meskipun capaian realisasi anggaran program rata-rata mencapai 99% dari target, pelaksanaan belum sepenuhnya optimal karena beberapa KPM dialihkan ke program lain atau meninggal dunia. Hambatan ini menekankan pentingnya pendataan dinamis dan terintegrasi agar kebijakan tepat sasaran. Secara keseluruhan, instrumen kebijakan BPNT APBD telah sesuai dengan kapasitas dan konteks kebijakan daerah, namun efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui penguatan data dan pemutakhiran penerima manfaat secara berkala.

B. Desain Kebijakan

Desain kebijakan BPNT APBD Kabupaten Kulon Progo telah diatur secara jelas dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022, mencakup prosedur, waktu, dan sumber daya. SOP pencairan, perjanjian kerja sama antar OPD mitra, serta keterlibatan kelompok penyedia lokal menunjukkan bahwa kebijakan ini dirancang dengan struktur pelaksanaan yang rinci dan realistis. OPD mitra juga memiliki tanggung jawab pembinaan terhadap penyedia, seperti KWT dan IKM. Dari segi sumber daya, program didukung oleh tim koordinasi lintas OPD, menunjukkan kesiapan kelembagaan dalam pelaksanaannya. Prosedur penyaluran disusun detail dan terjadwal, sehingga pelaksanaan berjalan cukup tertib. Terkait fleksibilitas desain, terjadi perubahan regulasi dari Perbup No. 3 Tahun 2021 ke Perbup No. 6 Tahun 2022, sebagai respons atas evaluasi dan arahan BPK agar penyaluran BPNT APBD lebih akuntabel dan tidak tumpang tindih dengan BPNT APBN. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan mampu beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan baru, serta mempertegas arah pelaksanaan program agar lebih efektif.

C. Struktur Pengawasan

Struktur pengawasan program BPNT APBD Kabupaten Kulon Progo mencakup dua jenis: pengawasan oleh masyarakat dan pengawasan oleh lembaga resmi. Pengawasan masyarakat masih belum berjalan optimal. Partisipasi warga terbatas, hanya diwakili oleh E-Warong, dan pengaduan yang masuk bersifat informal serta tidak terdokumentasi secara sistematis. Hal ini menunjukkan rendahnya keterlibatan publik dalam proses pengawasan

program. Sementara itu, pengawasan formal dilakukan oleh Inspektorat Daerah, BPKP, dan internal Dinas Sosial, khususnya Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin. Lembaga-lembaga ini melakukan pemantauan berkala, evaluasi anggaran, serta koreksi terhadap pelaksanaan jika ditemukan penyimpangan. Secara keseluruhan, meskipun pengawasan dari lembaga resmi berjalan baik, lemahnya pengawasan dari masyarakat menjadi tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas program.

D. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan program BPNT APBD Kabupaten Kulon Progo melibatkan banyak organisasi pelaksana, termasuk Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan UMKM, Bank BPD DIY, Kader Penanggulangan Kemiskinan, serta 24 E-Warong. Keterlibatan banyak pihak ini bertujuan untuk mendukung distribusi yang efektif serta menjamin kualitas komoditas lokal, dan telah diatur dalam SK Dinas Sosial serta perjanjian kerja sama lintas OPD. Namun, dari segi koordinasi, program BPNT APBD belum berjalan optimal. Meskipun rapat koordinasi dilakukan di awal tahun, beberapa OPD mitra menyatakan tidak dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan dan *monitoring* bulanan. Hal ini menyebabkan miskomunikasi serta lemahnya pembaruan data penyedia komoditas. Secara keseluruhan, meskipun jumlah organisasi pelaksana sudah memadai, koordinasi antar lembaga belum konsisten, sehingga menjadi kendala dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan BPNT APBD.

E. Kapasitas Administratif

Kapasitas administratif dalam implementasi program BPNT APBD Kabupaten Kulon Progo dinilai belum optimal meskipun telah didukung oleh anggaran yang memadai, penggunaan aplikasi digital (*Raharjo*), dan pemanfaatan media informasi resmi. Dari sisi ketersediaan sumber daya, Dinas Sosial PPPA menghadapi kekurangan signifikan pada sumber daya manusia, di mana hanya 38 pegawai tersedia dari kebutuhan ideal sebanyak 90 orang. Keterbatasan ini berdampak pada minimnya mobilitas dan keterjangkauan monitoring lapangan. Selain itu, aplikasi *Raharjo* yang digunakan untuk validasi data sering mengalami *error* dan pergantian admin, menghambat proses penyaluran bantuan. Dari segi kecukupan, meskipun teknologi dan media informasi tersedia, jangkauan dan efektivitasnya masih terbatas. Kemampuan melaksanakan SOP juga menjadi kendala karena banyak OPD mitra belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawabnya dalam perjanjian kerja sama, yang berdampak pada kualitas komoditas dan pelaksanaan *monitoring*. Secara keseluruhan, kapasitas administratif program BPNT APBD masih perlu diperkuat, khususnya dalam peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi, serta pemahaman dan penerapan SOP secara konsisten.

F. Penerimaan Sosial

Penerimaan sosial terhadap program BPNT APBD Kabupaten Kulon Progo tergolong tinggi. Masyarakat, terutama Keluarga Penerima Manfaat (KPM), merasakan manfaat nyata seperti terpenuhinya kebutuhan pokok bulanan, serta peningkatan pendapatan bagi kelompok penyedia komoditas seperti KWT, Gapoktan, dan IKM. Program ini juga melibatkan E-Warong yang dikelola oleh kelompok masyarakat kurang mampu dan difabel, sehingga memperkuat keterlibatan sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, masih terdapat kendala seperti akses jalan yang sulit dijangkau oleh KPM di wilayah pegunungan, gangguan teknis pada aplikasi penyaluran, serta keterbatasan jumlah pemasok komoditas dari OPD mitra yang belum memenuhi syarat minimal 70% sesuai Perbup No. 6 Tahun 2022. Selain itu, OPD mitra belum sepenuhnya memahami SOP dan mengalami kesulitan mencari pemasok berkualitas. Meski partisipasi masyarakat sudah aktif, kendala teknis dan

struktural ini menjadi hambatan dalam memastikan kesinambungan program dan efektivitas perlindungan produk lokal.

3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Produk Lokal di Kabupaten Kulon Progo

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan produk lokal di Kabupaten Kulon Progo didukung oleh sejumlah faktor penting. Landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Bupati Kulon Progo No. 6 Tahun 2022 memberikan kepastian regulasi, ditambah kejelasan prosedur melalui SOP dan keberadaan tim koordinasi lintas sektor yang mempermudah pelaksanaan teknis. Pengawasan berlapis dari lembaga internal dan eksternal turut menjamin akuntabilitas program. Kolaborasi antar lembaga yang solid serta keterlibatan aktif E-Warong dan OPD mitra memperkuat koordinasi dan efisiensi. Program ini juga didukung sumber daya operasional seperti anggaran APBD, teknologi aplikasi *Raharjo*, dan media informasi. Penerimaan masyarakat juga sangat tinggi karena manfaat langsung dirasakan, baik oleh KPM maupun kelompok penyedia komoditas lokal.

Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan SDM menyebabkan pengawasan di lapangan terbatas, dan aplikasi *Raharjo* sering mengalami gangguan teknis. Data penerima manfaat belum diperbarui secara berkala, menyebabkan bantuan tidak selalu tepat sasaran. OPD mitra juga belum sepenuhnya memahami SOP, sehingga pelaksanaan dan pengawasan tidak maksimal. Selain itu, pengawasan dari masyarakat masih sangat minim dan bersifat informal, tanpa saluran pengaduan yang responsif. Kendala-kendala ini menjadi hambatan dalam optimalisasi program, dan perlu segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan.

3.3. Upaya untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Produk Lokal di Kabupaten Kulon Progo

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi program BPNT APBD di Kabupaten Kulon Progo, diperlukan sejumlah upaya strategis yang melibatkan penguatan internal dan eksternal. Pertama, perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia di Dinas Sosial PPPA serta peningkatan kualitas teknologi aplikasi *Raharjo*, guna memperlancar pendataan, validasi, dan *monitoring* program. Kedua, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan sangat penting, yang dapat dilakukan dengan membentuk forum koordinasi rutin setiap tiga bulan agar pelaksanaan program lebih sinkron dan evaluatif. Ketiga, partisipasi masyarakat perlu diperkuat melalui pembentukan kelompok pengawas komunitas dan penyediaan kanal pengaduan yang responsif, guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Keempat, pemanfaatan media sosial harus dioptimalkan sebagai sarana diseminasi informasi publik secara edukatif dan interaktif, sehingga memperluas jangkauan komunikasi, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta membangun kepercayaan terhadap program. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong efektivitas, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis produk lokal di Kulon Progo.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program BPNT APBD di Kabupaten Kulon Progo telah berjalan cukup efektif, terutama dalam memadukan instrumen subsidi dan arahan yang tidak hanya menyalurkan bantuan kepada KPM, tetapi juga memberdayakan pelaku ekonomi lokal.

Berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Yenchilia Tresna Damanik dan Aufarul Marom pada judul penelitian Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharo Kecamatan Tembalang Kota Serang. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pelatihan keterampilan belum optimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan disebabkan program tidak berkelanjutan, masyarakat terkendala modal dalam membangun usaha, dan peran pendamping yang masih lemah (Damanik & Marom, 2016). Perbedaan penelitian menggunakan paradigma evaluasi kebijakan sedangkan penulis menggunakan teori implementasi kebijakan.

Desain kebijakan memiliki prosedur yang jelas melalui SOP dan regulasi formal, didukung pengawasan dari lembaga internal dan eksternal. Kolaborasi lintas instansi dan ketersediaan sumber daya keuangan serta teknologi turut memperkuat pelaksanaan. Selain itu, penerimaan sosial tinggi karena masyarakat merasakan langsung manfaat program, baik sebagai penerima maupun penyedia komoditas.

Namun, masih terdapat beberapa hambatan utama seperti keterbatasan SDM, kendala teknis pada aplikasi *Raharjo*, dan lemahnya pengawasan dari masyarakat. Koordinasi antar OPD mitra juga belum optimal, di mana pemahaman terhadap SOP masih rendah dan *monitoring* belum konsisten. Di sisi lain, meskipun pelibatan masyarakat sudah berjalan melalui E-Warong dan kelompok penyedia komoditas, jumlah pemasok belum memenuhi standar minimal, serta tantangan geografis dan iklim juga memengaruhi produksi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas administratif, penguatan koordinasi, dan optimalisasi partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mendorong keberlanjutan program secara lebih efektif dan inklusif.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam proses penelitian, penulis juga melihat faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan produk local di Kabupaten Kulon Progo. Faktor pendukungnya terdiri dari kemudahan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada program BPNT APBD yang telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2022, kejelasan prosedur dan waktu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), program diawasi oleh lembaga pengawas dan pengawasan internal, melibatkan berbagai instansi, serta adanya ketersediaan yang dibutuhkan pada program BPNT APBD berupa keuangan, teknologi, dan informasi.

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan produk local di Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari sumber daya manusia dan teknologi yang terbatas, kurangnya pembaharuan data terkait data penerima bantuan, kurangnya pemahaman OPD mitra tentang SOP program dan kurangnya pengawasan oleh masyarakat

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan produk local di Kabupaten Kulon Progo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BPNT APBD telah berjalan cukup efektif dalam menjawab permasalahan kemiskinan, khususnya melalui pendekatan berbasis lokal. Proses implementasi kebijakan menunjukkan bahwa penggunaan instrumen subsidi dan arahan telah tepat sasaran, di mana bantuan pangan tidak hanya meringankan beban keluarga penerima manfaat (KPM), tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal dengan

melibatkan petani, peternak, dan pelaku UMKM sebagai penyedia komoditas. Program ini diperkuat oleh desain kebijakan yang jelas melalui SOP dan regulasi formal, pengawasan dari lembaga pengawas, serta dukungan kelembagaan yang melibatkan berbagai OPD dan 24 E-Warong di tingkat lokal.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi meliputi landasan hukum yang kuat, kejelasan prosedur dan waktu, ketersediaan sumber daya keuangan dan teknologi, serta penerimaan sosial yang tinggi dari masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi hambatan serius, seperti terbatasnya SDM pelaksana, kendala teknis aplikasi *Raharjo*, kurangnya pemahaman OPD mitra terhadap SOP, belum optimalnya pembaruan data penerima, serta lemahnya pengawasan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi program dapat dilakukan melalui penambahan personel dan penguatan kapasitas teknologi, pembentukan forum koordinasi rutin antar pemangku kepentingan, peningkatan partisipasi dan pengawasan masyarakat, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana diseminasi dan transparansi informasi. Upaya-upaya tersebut diperlukan agar program BPNT APBD dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama terkait dengan terbatasnya waktu dan kurangnya referensi yang dapat mendukung penelitian tentang pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan produk lokal di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari penelitian ini masih bersifat awal dan pada lingkup yang terbatas pada program BPNT APBD, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan produk lokal.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dan jajarannya, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Kepala Seksi Agro Makanan dan Minuman Dinas Industri dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, kelompok pemasok komoditas program BPNT APBD, Kelompok E-Warung, dan keluarga penerima bantuan program BPNT APBD yang telah membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Publika*, 10(1), 175–190. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p175-190>
- Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15(2), 131–154. <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>
- Asongu, S. A., & Eita, J. H. (2023). The Conditional Influence of Poverty, Inequality, and Severity of Poverty on Economic Growth in Sub-Saharan Africa. *Journal of Applied*

Social Science, 17(3), 372–384. <https://doi.org/10.1177/19367244231171821>

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design* (5th ed.). SAGE Publications.
- Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12486>
- Damanik, Y. T., Marom, A., Publik, D. A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Diponegoro, U., Profesor, J., Soedarto, H., Kunci, K., Kebijakan, E., & Keterampilan, P. P. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(3). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i3.12486>
- Dewi, R. P., Rowa, H., & Dione, F. (2025). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 11(2), 94–105. [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).22194](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).22194)
- Handayani, N., Risyanti, R., & Simangungsong, F. (2023). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–77. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329>
- Iza, S. M., Dwi, I., & Nurhaeni, A. (2021). Proses Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan : Studi Kasus pada Program Gandeng Gendong di Yogyakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 365–379. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/wp.v1i2.54600>
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public Policy A New Introduction* (P. Caimey (ed.); 2nd ed.). Red Globe Press.
- Minarti, J. atin N. mah, Hamdi, B. I., & Kharisma. (2019). *Pengentasan kemiskinan melalui wirausaha pangan lokal*.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling For Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y.Purposeful>
- Reynaldy, B. (2024). *Penduduk Miskin di Pulau Jawa Mencapai 13 Juta Jiwa*. GoodStats.
- Risa, H., Badaruddin, & Tanjung, M. (2021). *Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading* (Vol. 10, Issue 2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207>
- Rumbekwan, M., Rahmadanita, A., Ajang, O. I., & Santoso, E. B. (2021). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(2), 217–230. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2218>
- Sadayi, D. P., SahatSianturi, & Salsabila, L. (2022). Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. *Dialektika Publik : Jurnal*

Administrasi Negara Universitas Putera Batam, 6(1), 28–34.
<https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v6i1.5452>

- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.); 1st ed.). KBM Indonesia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik Legalistik Empirik Inovatif* (3rd ed.). Alfabeta, cv.
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax Idea*, 2(6), 26–40. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i6.339>
- Statistik, B. P. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Turner, D. P. (2020). Sampling Methods in Research Design. *Headache*, 60(1), 8–12. <https://doi.org/10.1111/head.13707>
- Wicaksono, A. (2022). *Efektivitas Program Bela Beli Kulon Progo dalam Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal di Kaabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

